
STRATEGI KOREA UTARA DALAM MENGADAPI SANKSI PBB TAHUN 2006-2016

Rizki Sinthiadeti¹
Nim. 1402045081

Abstract

The results of this research shows that the strategy taken by North Korea such as making complex organizational networks, using the resources and national instruments of the country. Whereas different from countries in general that use their national instruments, diplomatic power, law enforcement and military power to fight international crime, North Korea directs its national instruments to carries out various illicit activities in other countries. In addition to North Korea's strategy is that they also leveraging its domestic market so that the county is able to maintain and continue to develop its nuclear weapons capabilities amid UN sanctions.

Keywords: *Nuclear Weapons, North Korea, UN Sanctions, Security Council*

Pendahuluan

PBB merupakan salah satu instrumen penjaga perdamaian dunia. PBB dituntut untuk mampu menangani situasi-situasi yang mengancam perdamaian dan stabilitas internasional sebagaimana dalam Pasal 24 Piagam PBB menyatakan yakni Dewan Keamanan (DK) PBB memegang tugas untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan berdasarkan instrumen hukum dalam Piagam PBB (Leonard, 1951: 58). Untuk tujuan itu DK PBB memiliki wewenang melakukan tindakan-tindakan yang efektif untuk melenyapkan ancaman-ancaman pelanggaran terhadap perdamaian sesuai dengan Pasal 1 Piagam PBB. Salah satu kasus yang telah berlangsung sejak lama dan membahayakan perdamaian dan keamanan internasional adalah masalah pengembangan nuklir Korea Utara.

Pada tahun 1985 Korea Utara menandatangani dan meratifikasi perjanjian non-proliferasi nuklir atau *Non-Proliferation Treaty* (NPT) dan perjanjian pengawasan *Safeguard Agreement* pada 1992 (Perry, 2006:80). Perjanjian tersebut berada di bawah tanggung jawab *International Atomic Energy Agency* (IAEA) yang memiliki tugas untuk memastikan bahwa negara melakukan penggunaan energi nuklir secara damai. Seiring berjalannya perjanjian NPT, perselisihan kerap terjadi antara Korea Utara dan IAEA, dikarenakan Korea Utara sering kali gagal untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama IAEA.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: rizkisinthiadd@gmail.com

Sehingga banyak perundingan multilateral *Six Party Talks* yang dilakukan untuk mengontrol dan memastikan bahwa pengembangan energi nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara tidak melebihi batas penggunaan energi nuklir secara damai. Perundingan multilateral *Six Party Talks* ini beranggotakan Tiongkok, Korea Utara, Amerika Serikat, Jepang, Rusia dan Korea Selatan (Cordesman & Hess, 2013: 64). Namun pada tahun 2002, Amerika Serikat menemukan bahwa Korea Utara melanjutkan pengayaan program uranium illegal, yang merupakan pelanggaran terhadap NPT. Sehingga Amerika Serikat mengirim inspektur IAEA ke Pyongyang untuk menginspeksi keberadaan pengayaan uranium tersebut. Hal ini menyebabkan Korea Utara memutuskan untuk berhenti dari NPT dan menolak menyampaikan rincian program nuklirnya kepada IAEA pada tahun 2003.

Dan dimulai dari tahun 2006 Korea Utara terhitung melakukan uji coba nuklir lima kali hingga tahun 2016. Masing-masing tahun dimana Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya PBB menjatuhkan sanksi resolusi sebagai respon atas pelanggaran yang dilakukan Korea Utara terhadap keamanan dan perdamaian dunia. (United Nations Security Council, 2006, 2009, 2013, 2016).

Namun demikian, sanksi yang menitikberatkan kepada ekonomi Korea Utara ditambah perubahan sikap oleh sekutunya ternyata tidak serta merta membuat Korea Utara jatuh terutama bidang ekonomi. Bank Sentral Korea Selatan (*The Bank of Korea*) menyatakan pertumbuhan ekonomi Korea Utara naik 3,1 persen pada tahun 2008. Kemudian *Gross Domestic Bruto* (GDP) Korea Utara naik 1,1 persen pada tahun 2013. *The Bank of Korea* juga mengumumkan pendapatan kotor nasional Korea Utara sebesar £19,6 juta (sekitar Rp 4 triliun) atau 2,3 persen pendapatan kotor Korea Selatan yang dinilai sebesar \$1,4 triliun, di tahun yang sama ekspor Korea Utara mencapai 11,8 persen. Pada tahun 2016 GDP Korea Utara mencapai sebesar 3,9 persen (Jiawen, 2017: 524).

Kerangka Konseptual

Compliance Theory

Kal Raustiala dan Anne-Marie Slaughter mendefinisikan *compliance* sebagai keadaan atau kesesuaian identitas antara perilaku aktor dan aturan yang ditentukan. Oran Young mengatakan *compliance* terjadi bila perilaku aktual subjek tertentu dalam hal ini negara sesuai dengan perilaku yang ditentukan, dan ketidakpatuhan atau pelanggaran terjadi ketika perilaku negara menyimpang dari perilaku yang ditentukan (Raustiala & Slaughter, 2002: 529).

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan secara sederhana bahwa ada negara yang hanya memilih untuk mengikuti sebuah perjanjian internasional karena ada kepentingan domestik yang memaksa keputusan sebuah negara untuk mengikuti sebuah perjanjian. Jika norma-norma di dalam sebuah perjanjian tidak sesuai dengan kepentingan negara partisipan maka akan memunculkan perilaku tidak patuh. Ketidakpatuhan juga dapat muncul karena faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan negara untuk mengikuti sebuah perjanjian internasional, yakni karena ingin mengikuti internasional *bandwagon*, dapat pula berupa tekanan dari negara lain- baik secara bujukan maupun ancaman. Dalam beberapa kasus, negara mengikuti sebuah perjanjian tanpa bermaksud mengubah tingkah laku mereka secara signifikan sehingga dapat mematuhi sepenuhnya. (Raustiala & Slaughter, 2002).

Sebagai penegakan penerapan atas konsekuensi ketidakpatuhan terhadap kewajiban sesuai kesepakatan, terdapat konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima sebuah negara, konsekuensi ini bisa bervariasi dari hukuman finansial penarikan hak istimewa, atau sanksi-sanksi termasuk sanksi perdagangan, sanksi militer dan sanksi ekonomi (Weiss & Jacobson, 2000: 511).

Sanksi dapat menimbulkan tanggapan negara yang beragam, sanksi dapat membuat negara kembali patuh kepada sistem internasional atau sanksi dapat menimbulkan tanggapan negara yang lebih intens. Sanksi multilateral seringkali lebih parah daripada sanksi sepihak. Dari perspektif dari negara penerima sanksi, sanksi dapat menimbulkan efek tak terduga, yaitu sikap pendukung dengan disetujui alternatif strategis untuk tetap bertahan dari resiko sanksi. Sebagai contoh, ada resiko bahwa negara kehilangan pasar penting untuk usaha internal dan bisnis mereka yang diakibatkan oleh sanksi berupa embargo, sehingga negara harus mencari alternatif dengan mencari negara lain yang bukan termasuk dalam instrumen sanksi (*non sanctioning*) (Colussi, 2016: 110).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitik. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *library research*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara metode teknik analisis data kualitatif-deskriptif, yaitu menjelaskan dan menganalisis data dengan cara menggambarkan hasil penelitian melalui sejumlah data yang berhasil diperoleh peneliti, dan menyajikan hasil dari penelitian tersebut, sehingga didapat analisa yang relevan atas permasalahan yang ada.

Hasil Penelitian

Pengembangan dan Pelaksanaan Uji Coba Nuklir Korea Utara

Korea Utara memulai program nuklirnya pada awal 1950-an. Pada Februari 1956, Korea Utara menandatangani piagam pendirian *Joint Institute for Nuclear Research* dan mulai mengirim ilmuwan dan teknisi ke Uni Soviet untuk mendapatkan pelatihan teknologi nuklir dasar. Kemudian pada tahun 1959, Korea Utara dan Uni Soviet menandatangani perjanjian tentang penggunaan energi nuklir secara damai yang mencakup bantuan Soviet untuk membangun kompleks penelitian nuklir di Yongbyon, Provinsi Pyongan Utara (Heo & Woo, 2008: 490).

Pada awal 1960-an, Uni Soviet memberikan bantuan teknis kepada Korea Utara dalam membangun Pusat Penelitian Nuklir Yongbyon yang berupa pemasangan reaktor riset nuklir model Uni Soviet IRT-2000 dan fasilitas terkait. Korea Utara menggunakan reaktor riset kecil ini untuk memproduksi radioisotope dan melatih personel (Karouf, 2000: 17). Korea Utara memperluas lembaga pendidikan dan penelitiannya untuk mendukung program nuklir untuk aplikasi sipil dan militer. Para tentara Korea Utara menerima pelatihan pengembangan rudal pada tahun 1965 ditandai dengan didirikannya Akademi Militer Hamhung (Bermudez, Jr, 1999: 2).

Selama masa dekade 1970-an Korea Utara mencapai puncak tertinggi dalam pengembangan nuklirnya tanpa bantuan Uni Soviet yang signifikan (Mazarr, 1997: 23). Sehingga pada tahun 1984 Korea Utara melaksanakan uji coba rudal Scud-B yang

pertama. Uji coba tersebut membuat Uni Soviet menekan Korea Utara untuk bergabung dengan *Non-Proliferation Treaty* (NPT) pada tanggal 12 Desember 1985 dan menandatangani perjanjian NPT dimana Korea Utara tidak akan menyebarkan nuklir (Heo & Woo, 2008: 491).

Kemudian pada 30 Januari 1992, Korea Utara menandatangani perjanjian pengawasan (*Safeguard Agreement*) yang disyaratkan oleh NPT untuk menerima inspeksi atas instalasi nuklir oleh IAEA dan Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara meratifikasi perjanjian pada 9 April 1992 (IAEA, 2020). Di bawah ketentuan perjanjian, IAEA memiliki hak dan kewajiban untuk memastikan dan meverfikasi bahwa fasilitas dan bahan nuklir yang dimiliki tidak dialihkan untuk menjadi senjata nuklir atau perangkat peledak nuklir lainnya. Namun berdasarkan analisa oleh satelit Amerika Serikat memperlihatkan bahwa Korea Utara memiliki jumlah plutonium yang lebih banyak dari yang dideklarasikan (Albright, 1994: 66-67). Hal ini menyebabkan perselisihan antara IAEA dan Korea Utara.

Sebagai usaha diplomatik terakhir Amerika Serikat untuk mengakhiri krisis nuklir, pada tahun 1994 Presiden mengunjungi Korea Utara dan bertemu dengan Pemerintah Korea Utara agar perang dapat dihindari (Perry, 2006: 81). Pertemuan ini menghasilkan *Agreed Framework* pada tahun 1994 yaitu persetujuan yang berisi penghentian program nuklir Korea Utara dengan diikuti fasilitas di Yongbyon. Sebagai gantinya, Jepang beserta Korea Selatan bersedia untuk membangun reaktor air ringan dan Amerika Serikat menyediakan 500.000 ton minyak solar setiap tahun untuk pemanasan dan pembangkit listrik tenaga air setelah selesai dibangun (Bureau of Arms Control, 1994).

Pada tahun 1998 Korea Utara telah merancang dua misil jarak jauh yang dapat mencapai sebagian wilayah Amerika Serikat dan Jepang yang bernama *intercontinental ballistic missile* (ICBM). Isu ini muncul pada 31 Desember 1998 ketika Korea Utara meluncurkan salah satu misilnya dengan jangkauan jelajah 1700-2200 km yang melewati wilayah Jepang dan mendarat di bawah bagian Hawaii, Samudera Pasifik (Perry, 2006: 82). Ketegangan internasional semakin meningkat pada tahun 2002, dimana intelijen Amerika Serikat dilaporkan menemukan bukti teknologi HEU dan/atau transfer bahan dari Pakistan ke Korea Utara sebagai imbalan atas teknologi rudal balistik (Niksich, 2010). Sehingga pemerintahan Amerika Serikat kemudian menghentikan bahan bakar minyak yang selama ini Amerika Serikat sediakan berdasarkan *Agreed Framework* dan menghimbau Korea Selatan beserta Jepang untuk menghentikan pengerjaan reaktor (Cordesman & Hess, 2013: 63). Korea Utara pun merespon hal tersebut dengan membuka kembali fasilitas reaktor nuklirnya, mengusir pengawas fasilitas nuklir IAEA yang berada di Yongbyon dan mengumumkan akan memproses kembali bahan bakar. Hingga akhirnya Korea Utara berhenti dan menolak menyampaikan rincian program nuklirnya dan mengumumkan penarikan dirinya dari NPT pada Januari tahun 2003.

Akhirnya pertemuan multilateral dimulai di Beijing dengan tujuan mengakhiri program senjata nuklir Korea Utara, pertemuan tersebut dinamai sebagai *Six Party Talks* (Cordesman & Hess, 2013: 64). Tiga pertemuan pertama tidak menghasilkan kemajuan, namun pertemuan keempat menghasilkan sebuah kesepakatan. Setelah pertemuan berakhir terdapat konflik yang kembali timbul antara Pyongyang dan Washington. Washington menyatakan bahwa *disarmament* adalah langkah pertama yang harus

dilakukan oleh Korea Utara hingga kemudian Washington akan mempertimbangkan permintaan Korea Utara akan reaktor air ringan. Namun Pyongyang menyatakan bahwa reaktor air ringan harus disediakan sebelum *disarmament* dimulai (Perry, 2006: 83-84).

Sementara itu program nuklir Korea Utara tetap berlanjut dan mengalami peningkatan dan krisis nuklir Korea Utara terus memburuk. Memasuki periode tahun 2006, Korea Utara telah melakukan uji coba senjata nuklir pertamanya dan berbagai macam uji coba terhadap kemampuan rudal dan misil pengangkut nuklir miliknya tercatat sampai tahun 2016, bentuk-bentuk uji coba yang telah dilakukan oleh Korea Utara adalah sebagai berikut (Arms Control Association, 2020):

1. Pada tanggal 9 Oktober 2006, Korea Utara benar-benar melakukan uji coba nuklir pertamanya. *The United States Geological Survey* mendeteksi terjadinya getaran 4,2 magnitudo di semenanjung Korea tepatnya dibawah tanah desa P'unggye, Kijilu County, Provinsi North Hamgyong. Hasil ledakan berkekuatan 1 kiloton atau sama dengan 1.000 TNT.
2. Pada tanggal 25 Mei Korea Utara bahkan memutuskan untuk melaksanakan uji coba nuklir berkekuatan 2 kiloton yang diikuti oleh uji coba tambahan beberapa misil jarak dekat.
3. Uji coba nuklir ketiga Korea Utara terjadi pada Februari 2013. Kantor berita Korea Selatan, Yonhap mengatakan uji coba tersebut berkekuatan 5,1 magnitudo dan terletak di daerah Kijilu, tempat lokasi uji coba Punggye-ri. Uji coba tersebut mengakibatkan gempa berkekuatan 4,9 SR pada kedalaman dangkal hanya 0,6 mil (The Telegraph, 2013).
4. Korea Utara mengumumkan pihaknya melakukan uji coba senjata nuklir keempat pada Januari 2016. Korea Utara mengklaim bahwa uji coba yang dilakukan adalah uji coba bom hidrogen untuk pertama kalinya.
5. Bulan September ditahun yang sama, Korea Utara kembali melakukan uji coba nuklir yang mengakibatkan gempa berkekuatan 5,3 SR. Militer Korea Selatan mengatakan ledakan tersebut berkekuatan sekitar 10 kiloton, cukup untuk menjadikan uji coba tersebut terkuat yang pernah ada. Ahli yang lain mengatakan indikasi awal menyarankan 20 kiloton atau lebih (BBC News, 2016).

Terlepas dari upaya perundingan-perundingan dan perjanjian yang telah disepakati oleh Korea Utara agar menghentikan uji coba nuklirnya, Korea Utara tetap tidak merubah perilakunya sesuai perjanjian dan semakin mengancam keamanan dan perdamaian dunia internasional. Sehingga Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi-sanksi berat terhadap Korea Utara.

Sanksi PBB Melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB

1. Resolusi 1718

Dikeluarkan atas uji coba nuklir pertama tahun 2006, adapun sanksi resolusi 1718 berisikan larangan impor pasokan persenjataan berat, teknologi dan material rudal, dan beberapa barang mewah (Security Council Condemns Use Of Ballistic Missile Technology in Launch by DPRK, in Resolution 1718, 2006).

2. Resolusi 1874

Dikeluarkan atas uji coba nuklir kedua tahun 2009, resolusi ini ditujukan untuk memperkuat resolusi sebelumnya dengan memasukan larangan ekspor dan impor semua senjata (Security Council Condemns Use Of Ballistic Missile Technology in Launch by DPRK, in Resolution 1974, 2009).

3. Resolusi 2094

Dikeluarkan atas uji coba nuklir ketiga tahun 2013. Resolusi 2094 mempertahankan dan menegaskan kembali resolusi yang diberlakukannya terlebih dahulu tahun 2006 di bawah resolusi 1718 dan resolusi 1874 tahun 2009 dengan memasukan tambahan sanksi keuangan, pemblokiran transaksi bagi individu maupun entitas milik Korea Utara (Security Council Condemns Use Of Ballistic Missile Technology in Launch by DPRK, in Resolution 2094, 2013).

4. Resolusi 2270

Dikeluarkan atas uji coba nuklir keempat tahun 2016, dalam resolusi ini mencakup larangan bagi negara anggota untuk memasok segala jenis bahan bakar dari Korea Utara dan perintah bagi negara anggota untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua kargo dari/ke Korea Utara (Security Council Condemns Use Of Ballistic Missile Technology in Launch by DPRK, in Resolution 2270, 2016). Serta berisikan perintah untuk memberlakukan sanksi diplomatik terhadap diplomat, perwakilan pemerintah atau pejabat negara jika seorang diplomat tersebut membantu penghindaran terhadap sanksi.

5. Resolusi 2321

Dikeluarkan atas uji coba nuklir kelima tahun 2016 (Security Council Condemns Use Of Ballistic Missile Technology in Launch by DPRK, in Resolution 2321, 2016). Dalam resolusi ini mempertahankan resolusi-resolusi yang telah diberlakukan sebelumnya dan beberapa tambahan yaitu larangan penjualan langsung atau tidak langsung segala jenis barang-barang mewah dengan Korea Utara, serta larangan bepergian dan pembekuan asset terhadap 10 perusahaan dan 11 individu atas keterlibatan dalam program militer Korea Utara.

Sanksi-sanksi resolusi tersebut ditujukan agar Korea Utara segera menghentikan dan meninggalkan program pengembangan nuklir dan kembali untuk menjalankan kewajiban sesuai perjanjian yang ditandatangani kepada IAEA. Namun Korea Utara belum menunjukkan akan merubah perilakunya dan tetap melakukan pengembangan nuklir. Hal ini memunculkan respon lebih lanjut dari negara-negara kawasan *Six party talks*.

Respon Negara Kawasan Mengenai Sanksi PBB Terhadap Korea Utara

1. Amerika Serikat

Atas uji coba nuklir Korea Utara dan pengunduran dirinya dari *Six Party Talks* pada 2009 dan tetap melanjutkan program nuklirnya, Amerika Serikat merubah kebijakannya menjadi *strategic patience*, yang pada dasarnya Amerika Serikat menunggu Korea Utara berubah sambil mempertahankan tekanan diplomatik dan ekonomi demi mematahkan pola “provokasi – pemerasan – imbalan” yang selama ini Korea Utara lakukan. Salah satu implementasi dari kebijakan tersebut, Amerika Serikat tetap melakukan negosiasi kepada Korea Utara untuk menghentikan program nuklirnya. Namun berbeda dari sebelumnya, imbalan yang diberikan sebatas bantuan makanan. Kesepakatan dari

negosiasi ini disebut sebagai *Leap Day Deal* (Foreign Policy, 2012). Berjalan dengan *Six Party Talks* dan *Leap Day Deal*, Amerika Serikat menghapus Korea Utara dari daftar terorisme pada Oktober 2008, di mana Korea Utara setuju untuk melanjutkan kembali penonaktifan fasilitas nuklirnya dan membuka kembali akses pengawasan ke situs-situs nuklir. Pada tahun 2012, Korea Utara kemudian meluncurkan roket yang di klaim sebagai satelit dengan tujuan damai. Amerika Serikat menganggap peluncuran tersebut sebagai pelanggaran terhadap perjanjian dan secara efektif memutuskan kesepakatan.

2. Jepang

Setelah uji coba nuklir pada 2006, Jepang mendukung sanksi PBB dan menjatuhkan sanksi yang melarang semua impor Korea Utara dan melarang fery dari Korea Utara untuk memasuki wilayah Jepang (Vyas, Chen & Roy, 2015: 72). Sanksi ini melampaui ruang lingkup yang diberlakukan oleh Dewan Keamanan PBB setelah uji coba nuklir Korea Utara. Hubungan Korea Utara dan Jepang memburuk secara signifikan tahun 2009 hingga 2015. Dengan dilema ketentuan-ketentuan perjanjian *Six Party Talks* dan pengunduran diri oleh Korea Utara, dilanjutkan dengan pengujian beberapa rudal balistik yang diikuti dengan uji coba nuklir, menyebabkan pemerintah Jepang menanggapi dengan memperpanjang dan memperluas rezim sanksi yang ada dan mengadopsi langkah-langkah baru meliputi pelarangan semua ekspor ke Korea Utara serta larangan perjalanan.

3. Korea Selatan

Pada tahun 1992, kedua negara Korea menandatangani *Joint Declaration of Denuclearization of The Korean Peninsula*, yakni kesepakatan untuk tidak melakukan uji coba, memproduksi, dan menggunakan senjata nuklir. Meskipun demikian, Korea Utara secara sepihak tidak menghormati kesepakatan dan tetap mengelola fasilitas dan mengembangkan program nuklirnya. Tetapi Korea Selatan tetap melakukan upaya untuk menormalisasi dan kerja sama damai terhadap Korea Utara melalui *Six Party Talks*. Upaya tersebut sempat terhenti karena Korea Utara tidak memiliki niat untuk mengubah perilakunya dan keluar dari *Six Party Talks*. Upaya kerja sama damai ini dipulihkan pada pertemuan puncak Presiden Korea Selatan tahun 2000-2007. Pertemuan-pertemuan ini menghasilkan sebuah kebijakan baru Korea Selatan yang dikenal sebagai *Sunshine Policy* (Hilpert & Meier, 2018: 19-20). Kebijakan *Sunshine* Korea Selatan ini memfasilitasi banyak pertemuan damai dengan Korea Utara, dan mengizinkan akses pengunjung Korea Selatan dan investor ke wilayah Korea Utara.

Serangkaian uji coba nuklir Korea Utara yang dimulai tahun 2006, menyebabkan pemerintahan Korea Selatan menghentikan *Sunshine Policy* dan melahirkan fase kebijakan baru dimana pemerintahan Korea Selatan secara resmi menghentikan perdagangan dengan Korea utara sebagai tindakan dukungannya terhadap sanksi PBB kepada Korea Utara (Foreign Affairs, 2012). Tindakan tersebut dilanjutkan dengan dihentikannya bantuan pemerintah langsung ke Korea Utara pada tahun 2010. Tidak hanya membatalkan bantuan bilateral yang telah disepakati pada pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Korea Selatan juga melarang segala perdagangan antar-kontak dengan Korea Utara, termasuk melarang warga negaranya untuk mengunjungi Korea Utara serta menghalangi upaya Organisasi Non-pemerintah Korea Selatan memberikan bantuan kemanusiaan ke Korea Utara, serta memblokir Korea Utara

menggunakan jalur lautnya (Cetri, 2010). Fase ini disebut sebagai *New Ice Age* yang berlangsung hingga tahun 2017.

4. Tiongkok

Ketika Korea Utara melakukan peluncuran roket pada 2012 dan uji coba nuklir ketiga pada 2013 memperburuk hubungannya dengan Tiongkok (38 North, 2013). Pada Mei 2013, Tiongkok mulai mengambil langkah untuk menerapkan sanksi, dimana *Bank of China* mengumumkan melakukan penutupan rekening *Foreign Trade Bank* (FTB) Korea Utara dan juga telah menghentikan semua transfer dana yang terkat dengan FTB (Financial Times, 2013). FTB merupakan Bank devisa utama Korea Utara sementara *Bank of China* adalah bank Negara terbesar untuk transaksi valuta asing. Selama ini Korea Utara menggunakan FTB untuk memfasilitasi transaksi jaringan proliferasi nuklirnya melalui *Bank of China*. Tiongkok sejauh ini adalah sekutu tradisional Korea Utara dan sebagian besar merupakan mitra dagang sekaligus Negara perantara terbesar bagi Korea Utara, sehingga penutupan rekening FTB ditujukan untuk menghambat bisnis Korea Utara dan mempersulit actor-aktor didalamnya untuk melakukan pengembangan nuklir (The Diplomat, 2013).

Dampak Sanksi PBB Terhadap Korea Utara

Sanksi yang ditujukan pada pemerintah dan instansi terkait program nuklir, sanksi-sanksi keuangan yang dijatuhkan kepada Korea utara tidak hanya menimbulkan kesulitan bagi pemerintahan Korea Utara dalam mencari pendapatan, tetapi secara tidak langsung juga berdampak pada penduduk Korea Utara, karena jika dilihat dari sejarah perekonomiannya, Korea Utara memiliki perekonomian yang memang tidak stabil dan masih banyak penduduk Korea Utara yang menderita kelaparan. (Park 2003: 5). Korea Utara merupakan salah satu negara yang meminta bantuan kemanusiaan kepada masyarakat internasional. Organisasi PBB, *United Nations Children's Fund* (UNICEF), *World Food Programme* (WFP) dan organisasi non-pemerintah lainnya menanggapi dengan menyediakan bantuan makanan dan bantuan kemanusiaan lainnya. Ketika diluncurkannya uji coba nuklir pada tahun 2006, jumlah bantuan makanan dari Amerika Serikat dan Korea Selatan menurun drastis menjadi 0% hingga tahun 2007 (Manyin & Nikitin, 2008: 2). Bersamaan dengan ini, bantuan WFP juga menurun drastis, dimana negara-negara lainnya turut enggan memberikan bantuan kepada Korea Utara. Hal ini menyebabkan bantuan makan hanya dapat diberikan kepada 1,9 juta orang, kurang dari satu per tiga dari 6,4 juta orang yang ditargetkan oleh WFP sebelumnya.

Kemudian dampak lain dari sanksi yang merugikan Korea Utara, ialah penutupan FTB oleh *Bank of China*. Korea Utara menggunakan bank ini untuk menyimpan dan/atau menukar mata uang, dimana uang tersebut digunakan dalam kesepakatan yang berkaitan dengan proyek *weapon of mass destruction* (WMD) atau program nuklir dikembangkan oleh Korea Utara (Kan, Bechtol, Jr & Collins, 2010: 5). Sehingga penutupan FTB menghambat proses produksi yang dibutuhkan Korea Utara untuk melakukan transaksi penjualan senjata, teknologi dan bahan rudal. Selain *Bank of China* yang melakukan penutupan terhadap FTB, cabang FTB di negara-negara Rusia, Libya, Thailand, Kuwait dan Austria juga melakukan penutupan atas bank Korea Utara tersebut (Foundation For Defense Of Democracies, 2020).

Meskipun demikian, terdapat bukti bahwa perekonomian Korea Utara terus meningkat selama sanksi berlangsung. Menurut *The Bank of Korea*, meskipun sedang dijatuhi sanksi ekonomi, perekonomian Korea Utara tumbuh sebesar 3,1 persen pada tahun 2008 dan 0,8 – 1,3 persen per-tahun sejak 2011 (Jiawen, 2017: 524). Kemudian *Gross Domestic Bruto* (GDP) Korea Utara naik 1,1 persen pada tahun 2013. *The Bank of Korea* juga mengumumkan pendapatan kotor nasional Korea Utara sebesar £19,6 juta (sekitar Rp 4 triliun) atau 2,3 persen pendapatan kotor Korea Selatan yang dinilai sebesar US\$ 1,4 triliun, di tahun yang sama ekspor Korea Utara mencapai 11,8 persen. GDP Korea Utara mencapai puncaknya pada tahun 2016 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 3,9 persen. Kemudian *South Korean government-affiliated Korea Trade-Investment Promotion Agency* atau KOTRA memperkirakan bahwa anggaran negara Korea Utara tumbuh antara 6 persen pada 2016. KOTRA juga mengungkapkan jumlah perdagangan Korea Utara telah meningkat, menunjukkan pertumbuhan 5 persen dari 2016 mencapai US\$ 6,5 miliar.

Strategi Dengan Melakukan Kegiatan Dilarang Hukum (*Illicit Activities*)

Korea Utara menjalankan strateginya dengan melakukan segala upaya yang dianggap perlu bagi keberlangsungan rezim. Hal ini menggambarkan bagaimana Korea Utara dengan perilaku *intentional non-compliance* atau *ketidapatuhan yang disengaja* terus melakukan uji coba nuklir dan tidak mengindahkan sanksi. Korea Utara justru melakukan kegiatan lain, sekalipun dengan melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Sebuah laporan tahun 2007 kepada Kongres menjelaskan bagaimana Kim Jong Il menciptakan sebuah badan yang disebut *Office 39*. *Office 39* dibuat sebagai departemen dalam lingkungan Sekretariat *Korean Worker's Party* (KWP) di bawah Komite Pusat KWP. *Office 39* juga secara eksklusif diawasi langsung oleh pemimpin Korea Utara. Kantor tersebut didirikan dengan tujuan menjalankan kegiatan ilegal (*crime-for-profit activity*) untuk menghasilkan uang demi keberlangsungan rezim Korea Utara (Lee & Choi, 2009: 5).

1. Perdagangan Obat-obatan Terlarang

Korea Utara diketahui melakukan perdagangan narkoba secara sembunyi-sembunyi. Semenjak Korea Utara dijatuhi sanksi oleh PBB, pemerintah Korea Utara memutuskan untuk memproduksi metamfetamim dalam skala industri untuk di ekspor ke luar negeri. Menurut Laporan Pers Korea Selatan, Kedutaan Korea Utara di berbagai negara menerima sejumlah kiriman obat-obatan terlarang dari Korea Utara. Kedutaan diberi perintah untuk menjual obat-obatan tersebut dan mengirim uang kembali ke Korea Utara (Business Insider, 2013). Informasi tersebut dilaporkan berasal dari pembelot Korea Utara, yang pernah melakukan pengiriman obat-obatan tersebut ke Kedutaan Korea Utara di Eropa Timur, dan ia mengatakan perintah yang sama juga telah dikirim ke Kedutaan lain. Sumber-sumber pemerintah Korea Selatan memperkirakan produksi tahunan obat-obatan terlarang Korea Utara mencapai 3.000 kg, dan penjualan obat terlarang tahunan Korea Utara ke luar negeri berjumlah \$100 Juta hingga \$200 Juta (The Chosunilbo Media, 2013).

Jika sebelumnya Korea Utara hanya melakukan ekspor obat-obatan terlarang ke Tiongkok, pasca dijatuhkannya sanksi Korea Utara kemudian memperluas jaringan

ekspor obat-obatan terlarangnya dengan organisasi distribusi obat-obatan di Asia Tenggara, Hong Kong, Amerika Serikat dan Afrika Barat (DW, 2017). Produk metamfetamim yang telah menjadi sabu sering diselundupkan ke Tiongkok, dan kemudian dipindahkan ke Shandong dan Tianjin, Beijing dan provinsi pedalaman lainnya (Brookings, 2010). Dari sana proses penyelundupan sabu akan dilanjutkan ke tempat-tempat seperti Asia Tenggara, Jepang dan Korea Selatan, dimana sabu tersebut akan menghasilkan laba yang lebih tinggi. Seorang profesor dari *The Peoples Public Security University* yang bernama Zhang Li, menjelaskan obat-obatan Korea Utara untuk dikirim ke negara lain, pertama akan masuk ke Tiongkok melalui jalur laut, yang kemudian akan di transfer ke negara lain, di mana obat-obatan tersebut kemudian diselundupkan ke negara-negara Taiwan, Korea Selatan, Indonesia, Jepang serta Amerika Serikat (Bechtol, Jr, 2018: 51).

2. Perdagangan Senjata

Di bawah Resolusi 1874 tahun 2009, PBB memperluas sanksi terhadap Korea Utara memasukan pelarangan ekspor dan impor semua senjata. Meskipun demikian, Korea Utara masih dapat menghasilkan jutaan dari penjualan senjata dan merupakan salah satu pengeksport utama senjata ilegal dunia, menurut sebuah laporan oleh Survei Senjata Kecil di *Geneva Graduate Institute* (Money CNN, 2017). Untuk tetap dapat melakukan perdagangan senjata, di mana Korea Utara berada di bawah sanksi yang ketat, Korea Utara sangat mahir dalam menggunakan *Shell Company/Front Company* (Frontline Newsletter, 2017).

Bruce E. Bechtol menjelaskan contoh kasus dalam jurnalnya *Illicit Activities and Sanctions: A National Security Dilemma* bagaimana Korea Utara menggunakan *Front Company* untuk melancarkan perdagangan senjata sebagai berikut; pesawat kargo buatan Rusia yang membawa 35 ton angkutan itu dimiliki oleh seorang penyelundup senjata internasional yang perusahaannya terdaftar di UEA. Izin operasi untuk pesawat dimiliki oleh perusahaan Georgia, pesawat kemudian disewa oleh perusahaan Hong Kong. Setelah di sewa pesawat berangkat dari Azerbaijan, akhirnya mendarat di Pyongyang. Dari sana, pesawat berangkat ke Teheran, di mana 35 ton muatan senjata seperti granat berpeluncur roket (RPG), rudal *surface-to-air*, dan banyak senjata ringan lainnya yang akan dikirim ke Hezbollah oleh warga negara Iran (Bechtol, Jr, 2018: 64).

Pasca tertangkapnya kargo senjata Korea Utara tahun 2009, studi oleh *Panel Experts* Dewan Keamanan PBB pada tahun 2016 menunjukkan bahwa Korea Utara terus berhasil menghindari sanksi (VOA News, 2017). Studi ini juga menunjukkan bahwa Korea Utara terus menggunakan sistem internasional dan berhasil menemukan celah dari sanksi. Dalam laporan studi tersebut menunjukkan Korea Utara tetap terus mengembangkan perlengkapan senjata militer di Timur Tengah dan negara-negara di Afrika. Korea Utara berhasil melakukan perdagangan senjata ke negara Tiongkok, Kuba, Burma, Iran, Sudan, Arab Saudi, Mesir, Eritrea, Syria dan UAE. Korea Utara bahkan mengirim suku cadang untuk rudal balistik (Scud) ke Mesir (VOA News, 2017). Selain itu, Tanzania, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Namibia dan Yemen juga merupakan negara konsumen dari Korea Utara. Negara-negara tersebut telah menerima bantuan dari Korea Utara dalam mengembangkan pabrik senjata kecil dan amunisi (Money CNN, 2017). Negara-negara Afrika lainnya seperti, Tanzania, Uganda, Angola, Mozambik, Benin, Boswana,

Mali dan Zimbabwe merupakan negara-negara yang juga membeli senjata dari Korea Utara. Ditambah lagi kapal-kapal untuk mengangkut kargo senjata ini juga akan selalu berganti bendera. Strategi untuk mengganti bendera kapal digunakan Korea Utara untuk mendapatkan celah hukum, karena terdapat sanksi yang melarang kapal berbendera Korea Utara di dalam resolusi 1718 tahun 2006, yang mengharuskan pemeriksaan terhadap kapal tersebut.

3. Penyelundupan dan Perdagangan Cula Badak, Gading dan Emas Ilegal

Dalam sebuah laporan dari *Global Initiative Against Transnational Organized Crime*, setidaknya terdapat 18 contoh kasus diplomat Korea Utara yang tertangkap melakukan penyelundupan cula badak dan gading dari Afrika. Namun dimulai pada tahun 2015 dan 2016 terdapat banyak kasus penangkapan diplomat yang menyelundupkan cula badak di dalam tasnya (Rademeyer, 2017). Dan dimulai dari tahun 2007 perburuan badak mulai meningkat dan dari tahun 2014 perburuan badak Afrika Selatan naik menjadi 9000 persen.

Sebagai contoh kasus, di dalam laporan tersebut, seorang pembelot mantan perantara ekspor-impor yang bekerja di bawah paspor diplomatik Korea Utara dan sekarang tinggal di Seoul, menjelaskan bagaimana proses penyelundupan ini terjadi dan pekerjaannya termasuk secara teratur memfasilitasi transaksi antara para diplomat yang ditugaskan di Afrika dan penyelundup Tiongkok, sebagai berikut; Diplomat dari Afrika pergi ke Tiongkok membawa cula badak, gading gajah dan emas, tidak jarang diplomat-diplomat tersebut membawa ornamen-ornamen kuno yang digunakan oleh raja (Rademeyer, 2017: 16). Sesampainya di Beijing diplomat bertemu langsung dengan penyelundup-penyelundup Tiongkok atau perantara dan menukarkannya dengan uang tunai. Gading dan emas berasal dari Kongo. Ada juga gading dari Angola dan cula badak kebanyakan Afrika Selatan dan Mozambik.

Atase militer di Kedutaan Besar di Ethiopia membawa gading dan batu emas. Mereka juga membawa cula badak, terkadang dari Angola. Setiap kedutaan pergi ke Tiongkok sebanyak dua atau tiga kali setiap tahun. Seorang pejabat perdagangan Korea Utara yang berbasis di Harare, Zimbabwe juga melakukan perjalanan ke Beijing setidaknya dua kali setahun, dan menghasilkan banyak uang dari penjualan cula dan gading sehingga pada tahun 2013 dan 2014 ia mengirim uang sebesar \$200.000 ke pemerintah Korea Utara. Para diplomat biasanya menyimpan 15 persen hingga 20 persen dari penjualan cula badak atau gading dan sisanya akan diserahkan kepada pemerintah Korea Utara. Sementara bagi perantara akan mendapatkan komisi sebesar 5 persen dari setiap transaksi.

4. Melakukan Peretasan Bank Dunia

Berbeda dari kegiatan ilegal lainnya, kegiatan peretasan bukan bagian dari tanggung jawab *Office 39*. Kegiatan peretasan dilakukan oleh *The Reconnaissance General Bureau* (RGB) yang merupakan badan utama rezim yang bertanggung jawab atas aktivitas dunia maya. Didirikan antara tahun 2009 dan 2010, tingkat RGB setara dengan *Office 39*, dan juga memiliki kewajiban untuk melapor langsung ke Komisi Urusan Negara yang dipimpin oleh Kim Jong Un (Ha & Maxwell, 2018: 11).

Korea Utara tercatat melakukan beberapa kali percobaan peretasan yang dimulai tahun 2013 hingga berhasil mencuri senilai \$81 miliar pada tahun 2016. Keberhasilan Korea Utara dalam meretas dan mencuri dari bank di Bangladesh tidak serta merta membuat negara tersebut membatasi diri mereka untuk mencuri mata uang tradisional. Peretasan mereka mencakup serangkaian upaya untuk mencuri *cryptocurrency* yang semakin berharga seperti *bitcoin*. Mereka juga menargetkan sejumlah besar pertukaran *bitcoin*, terutama di Korea Selatan yang dikenal sebagai *Younbit* (Wired, 2020). Menurut laporan rahasia PBB yang dilihat oleh *Reuters*, Korea Utara telah menghasilkan sekitar \$500 juta untuk program senjata nuklirnya, dengan menggunakan serangan dunia mayanya yang semakin canggih untuk mencuri dari bank dan *cryptocurrency* (Reuters, 2019).

Strategi Memanfaatkan Keadaan Domestik. (*Non- Illicit Activity*)

Selain melancarkan strategi kegiatan dilarang hukum, Office 39 mengembangkan strateginya ke kegiatan lain, dengan memanfaatkan keadaan domestiknya, dengan cara mengekspor warga negaranya sebagai tenaga kerja ke luar negeri, mendorong dan mengembangkan pariwisata dalam negeri, dan melakukan pengembangan smartphone dan operator seluler domestik. Meskipun kegiatan-kegiatan ini tidak dilarang oleh sanksi, dan kegiatan ini bukan merupakan tindakan yang dilarang hukum sehingga sistem internasional tidak berhak untuk menghentikannya, kegiatan-kegiatan ini tetap secara tidak langsung berkontribusi dalam melanggengkan ketidakpatuhan Korea Utara untuk terus berjalan dan memungkinkan rezim terus berkuasa. Dengan menggunakan pendapatan dari kegiatan ini untuk terus mengembangkan serta melakukan uji coba nuklir.

1. Pengiriman Tenaga Kerja

Ekspor tenaga kerja merupakan salah satu kebijakan Korea Utara untuk mendapatkan pendapatan bagi negaranya. Sebanyak 74.000 hingga 81.000 tenaga kerja Korea Utara dikirim untuk bekerja di 40 negara yang berbeda (Greitens, 2014: 54). Dari yang sebelumnya hanya berjumlah 1.000-2.000 pekerja yang dikirim ke luar negeri (New York Times, 2015). Kemudian mulai tahun 2012, jumlah ekspor tenaga kerja tersebut mulai meningkat, hingga tahun 2016 Departement Luar Negeri AS melaporkan tenaga kerja yang dikirim ke luar negeri mencapai jumlah 100.000 orang, kurang lebih ke 40 negara dan 80 persen diantaranya berada di Rusia dan Tiongkok (Aljazeera, 2020. Lihat juga; The Telegraph, 2015).

Setiap tenaga kerja Korea Utara setiap bulannya diberikan upah sekitar \$200 hingga \$250, menurut laporan dari *North Korea Strategy Centre* (NKCS) dan *The International Network for The Human Rights of North Korean Overseas Labor* (INHL) (Greitens, 2014: 56). Untuk upah yang peroleh, dari total pendapatan yang diterima, sekitar 70% sampai 90% harus diserahkan kepada Pemerintah Korea Utara. Uang tersebut akan digunakan sebagai sumber pendanaan penting bagi pemerintah Korea Utara, khususnya untuk program pengembangan program senjata nuklir. Laporan ini memperkirakan bahwa pemanfaatan tenaga kerja Korea Utara menghasilkan \$150 Juta hingga \$230 Juta setiap tahunnya.

2. Pengembangan Pariwisata Domestik

Sejak dijatuhkannya sanksi PBB, Kim Jong Il memerintahkan personel dalam pemerintahannya untuk membangun resor ski kelas dunia, resor Masikryong dan kompleks hotel. Ia juga mendirikan *Wonsan-Mt. Kungang International Tourist Zone*, dan *Mubang Special Zone for International Tour* di dekat gunung Baekdu, untuk menarik wisatawan asing ke Korea Utara (Yi, Ma & Yoon, 2017: 2). Namun, industri pariwisata tersebut tidak berhasil karena kurangnya wisatawan dan investasi asing akibat dari sanksi.

Korea Utara kemudian mengubah strategi pengembangan wisatanya pada tahun 2010. Korea Utara mengeluarkan kebijakan untuk mengizinkan wisatawan dari Tiongkok dan Rusia dapat berkunjung tanpa visa (Yi, Ma & Yoon, 2017: 3). Para turis hanya diharuskan untuk mengirim salinan paspor dan dokumen identifikasi sebelum melakukan perjalanan. Secara keseluruhan *The Korea International Travel Company* (KITC) adalah agensi yang menarik wisatawan asing milik Korea Utara. Khusus untuk wisatawan Barat, KITC mengelola agensi yang dinamakan *Young Pioneer Tour* atau *Koryo Tour* (Weismann & Hagström, 2016: 68). Wisatawan Barat diberikan tawaran perjalanan paket wisata sebagian besar ke Pyongyang, Nampo, Gaeseong, Panmunjeon, Gunung Kungang, dan Gunung Myohyang (Yi, Ma & Yoon, 2017: 4). Dimana sebelumnya, wisatawan Barat enggan untuk mengunjungi Korea Utara dikarenakan letak Korea Utara yang jauh dari Benua Amerika dan memakan biaya yang mahal.

Sejumlah 4.000 wisatawan Barat dan lebih dari 237.400 wisatawan Tiongkok mengunjungi Korea Utara pada tahun 2012 (Greitens, 2014: 51). Pada 2013, Koyro Tour membawa sekitar 2.400 wisatawan ke Korea Utara dan Young Pioneer Tour membawa sekitar 1.000 wisatawan. Pada paruh kedua tahun 2016, jumlah wisatawan Tiongkok melonjak menjadi 580.000 orang (Reuters, 2017). Korea Utara telah mengembangkan berbagai jenis kegiatan di berbagai bidang. Program perjalanan wisata bervariasi dengan berbagai tema seperti pengunjungan arsitektur, hortikultura, memancing, berselancar, dan lain-lain. Selain itu, Korea Utara baru-baru ini membuka turnamen maraton nasional untuk orang asing, dengan tujuan untuk menarik lebih banyak wisatawan asing. Penghasilan dari pariwisata ini diperkirakan mencapai \$100 Juta setiap tahunnya. Meskipun pendapatan dari pariwisata tidak sebesar jumlah pendapatan dari kegiatan dilarang hukum yang dilakukan Korea Utara, namun akan tetap berkontribusi penting bagi pemerintah Korea Utara demi program pengembangan senjata nuklirnya.

3. Pengembangan Smartphone dan Operator Seluler

Korea Utara menghindari sanksi PBB dengan memanfaatkan permintaan domestik yang meningkat untuk *smartphone*. Bersamaan dengan berkembangnya sumber daya manusia dalam perkembangan teknologi dalam negeri, Korea Utara melakukan impor perangkat keras berbiaya rendah untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi rezim (Reuters, 2019). Warga negara Korea Utara telah menggunakan telepon sejak 2013, yang sebagian besar dibuat di perusahaan-perusahaan dalam negeri Korea Utara.

Dua *smartphone* bermerek (Business Insider, 2018): *Pyongyang Touch* dan *Arirang* dibuat di Korea Utara, ditenagai oleh chip dari *MediaTek* Taiwan dan menjalankan sistem operasi versi Google Android. Untuk aksesoris *smartphone* yang berbentuk

headset bermerek Arirang juga menggunakan chip MediaTek. Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah mendukung jaringan *wireless*, beberapa dilaporkan dibangun dengan bantuan *Huawei Technologies China* (Reuters, 2014). *Smartphone* Korea Utara biasanya berharga antara \$250 hingga \$400, dijual di toko-toko pemerintah. Untuk operator seluler, di Korea Utara hanya memiliki satu operator yaitu Koryolink, sebuah *joint venture* antara *The North Korea Ministry of Post and Telecommunication* dan *Orascom Telecom and Media and Technology* (OTMT) yang berbasis di Mesir. Dalam *joint venture* tersebut, 25% saham dimiliki oleh Korea Utara sementara 75% dimiliki oleh Mesir (Greitens 2014: 62).

Bersamaan dengan meluasnya penjualan telepon seluler kepada warga negara Korea Utara, pada tahun 2013, pemimpin Korea Utara mengeluarkan kebijakan bahwa para wisatawan asing diperbolehkan untuk membawa telepon bersamanya. Dimana sebelumnya telepon seluler milik wisatawan asing diminta untuk disimpan di bandara pada saat kedatangannya (Greitens 2014: 63). Wisatawan yang tiba di bandara akan ditawarkan untuk menggunakan operator seluler Koryolink. Satu laporan dari pemerintah Korea Selatan, memperkirakan laba industri *smartphone* dan operator seluler Korea Utara mencapai \$400 hingga \$200 Juta pada akhir tahun 2013. Pada 2015, pendapatan laba dari industri *smartphone* dan operator seluler ini mencapai \$585 Juta (Weismann & Hagström, 2016: 67). Industri *smartphone* dan operator seluler memberikan aliran pendapatan ke Korea Utara yang cukup besar.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan di atas, hal-hal tersebutlah yang menggambarkan bagaimana perilaku *intentional non-compliance* yang dilakukan oleh Korea Utara sebagai strategi untuk menghadapi sanksi PBB. Meskipun berada di bawah tekanan sanksi yang semakin kuat setiap tahunnya, Korea Utara menciptakan cara lain untuk menghindari sanksi dengan mahir dalam mendanai program nuklirnya.

Kesimpulan

Strategi Korea Utara dalam menghadapi sanksi PBB, dengan perilaku *intentional non-compliance* yang dilakukan dapat membuat Korea Utara mempertahankan rezimnya dan membuktikan kemampuannya mengembangkan sejumlah teknik dan jaringan organisasi yang kompleks untuk memungkinkannya menghindari sanksi, dengan melakukan kegiatan dilarang hukum yang mencakup; pembuatan obat-obatan terlarang yang dijual di negara-negara Asia Tenggara, memproduksi senjata yang di jual di negara-negara Timur Tengah dan Afrika, memanfaatkan kops diplomatiknya untuk melakukan penyelundupan binatang-binatang langka dari Afrika ke Tiongkok, serta peretasan dan pencurian bank-bank di dunia. Kegiatan-kegiatan ini yang diyakini menghasilkan ratusan juta dolar tiap tahunnya. Keberhasilan Korea Utara ini juga ini juga didukung oleh ketidakpatuhan negara-negara dan individu yang tidak mengindahkan peringatan dan sanksi resolusi PBB. Kemudian, kegiatan lain yang dilakukan oleh Korea Utara adalah; melakukan ekspor tenaga kerja ke luar negeri agar tenaga kerja tersebut dapat mengirimkan uang gaji yang mereka dapatkan kembali ke negara, mendorong dan mengembangkan pariwisata dalam negeri, serta melakukan pengembangan *smartphone* dan operator seluler domestik. sehingga Korea Utara tetap dengan mudah tetap dapat melancarkan kegiatan perdagangannya. Hal tersebut terbukti dengan berhasilnya uji coba nuklir yang dilakukan sebanyak lima kali terhitung dari tahun 2006 hingga 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Colussi, Ilaria Anna, 2016, *Action And Reaction: Effect of Country-based Trade Sanction*, Strategic Trade, Volume 2, Issue 3

Cordesman, Anthony H. dan Hess, Ashley, 2013, *The Evolving Military Balance in The Korean Peninsula and Northeast Asia: Strategy, Resources, and Modernization*, Center For Strategic & International Studies, CSIS Report

Greitens, Sheena Chestnut, 2014, *Illicit: North Korea's Evolving Operations to Earn Hard Currency*, Committee for Human Rights in North Korea, Washington

Ha, Mathew dan Maxwell, David, 2018, *Kim Jong Un's 'All Purpose Swords' North Korean Cyber-Enabled Economic Warfare*, Foundation For Defense Of Democracies, FDD Press

Heo, Uk dan Woo, Jung-Yeop, 2008, *The North Korean Nuclear Crisis: Motives, Progress and Prospects*, Korea Observer, Vol. 39, No.4, The Institute Of Korean Studies

Kan, Paul Rexton, Bechtol, Jr, Bruce E., dan Collins, Robert M., 2010, *Criminal Sovereignty Understanding North Korea's Illicit Internasional Activities*, Strategic Studies Institutes

Karouv, Gregory, 2000, *A Technical History of Soviet-North Korean Nuclear Relations*, Routledge, New York

Leonard, L. Larry, 1951, *International Organization*, London, McGraw Hill Book Company

Mazarr, Michael J., 1997, *North Korea and The Bomb: A Case Study in Non Proliferation*, Macmillan Press, London

Park, Soo-Bin, 2003, *North Korean Economy: Current Issues and Prosect*, Assosiation of Korean Studies, Carleton University

Perry, Willian J., 2006, *Proliferation on the Peninsula: Five North Korean Nuclear Crisis*, Annals of The American Academy of Political Science, Vol. 607, Sage Publication

Raustiala, Kal dan Slaughter, Annie-Marie, 2002, *The Handbook of International Relation*, Sage Publication

Vyas, Utpal, Chen, Ching-Chang, dan Roy, Denny, 2015, *The North Korean Crisis and Regional Responses*, East West Center

Weismann, Mikael dan Hagström, Linus, 2016, *Sanctions Reconsidered: The Path Forward With North Korea*, The Washington Quarterly, Routledge

Weiss, Edith Brown & Jacobson, Harold K., 2000, *A Framework for Analysis Engaging Countries: Strengthening Compliance With International Environmental Accords*, The MIT Press

Jurnal :

Albright, David, 1994, *North Korean Plutonium Production*, Science & Global Security, Volume 5, Overseas Publishers Association

Betchtol, Jr, Bruce E., 2018, *North Korean Illicit Activities and Sanctions: A National Security Dilemma*, Cornell International Law Journal Vol. 51, University Press of Kentucky

Bermudez, Jr, Joseph S., 1999, *A History of Ballistic Missile Development in the DPRK*, Occasional Paper No. 2, Center for Nonproliferation Studies

Hilpert, Hans Gunther dan Meier, Oliver, 2018, *Facets of The North Korea Conflict: Actors, Problems and Europe Interests*, SWP Research Paper, German Institute for International and Security Affairs

Jiawen, Chen, 2017, *Why Economic Sanction on North Korea Failed To Work*, China Quarterly of International Strategic Studies, Vol. 3, No. 4

Lee, Karin dan Choi, Julia, 2009, *North Korea : Unilateral and Multilateral Economic Sanction*, The National Committee On North Korea

Manyin, Mark E. dan Mary Nikitin, Beth, 2008, *US Assistance to North Korea*, Foreign Affairs, Defense, and Trade Division , CRS Report For Congress

Niksch, Larry A., 2010, *North Korea's Nuclear Development and Diplomacy*, Congressional Research Service, CSR Report For Congress

Rademeyer, Julian, 2017, *Diplomat and Deceits: North Korea's Criminal Activities in Africa*, The Global Initiative Against Transnational Organized Crime

Yi, SangChoul, Ma, Chang-mo dan Yoon, InJoo, 2017, *A New Paradigm for Tourism Development in North Korea*, Travel and Tourism Research Association, University of Massachusetts Amherst

Internet :

Abrahamian, Andray, 2013, *China Closes Pyongyang Bank Account*, The Diplomat, Tersedia di : <https://thediplomat.com/2013/05/china-closes-pyongyang-bank-account/>

Ahn, Christine dan Kim, Haeyong, 2010, *Sixty Years of Failed Sanctions*, CETRI, Tersedia di : <https://www.cetri.be/Sixty-Years-of-Failed-Sanctions?lang=fr>
China Reduces Banking Lifetime to N Korea, 2013, Financial Times, Tersedia di : <https://www.ft.com/content/a7154272-b702-11e2-a249-00144feabdc0>

Besheer, Margareth, 2017, *UN Security Council Imposes New Sanctions on North Korea*, VOA News, Tersedia di :

<https://www.voanews.com/east-asia-pacific/un-security-council-imposes-new-sanctions-north-korea>

Buchanan, Ben, 2020, *How North Korean Hackers Rob Banks Around The World*, WIRED, Tersedia di : <https://www.wired.com/story/how-north-korea-robs-banks-around-world/>

Einbinder, Nicole, 2017, *How North Korea Uses Front Company to Help Evade Sanctions*, Frontline Newsletter, Tersedia di :

<https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/how-north-korea-uses-front-companies-to-help-evade-sanctions/>

Fitzpatrick, Mark, 2019, *Leap Day in North Korea*, Foreign Policy, Tersedia di :

<https://foreignpolicy.com/2012/02/29/leap-day-in-north-korea/>

IAEA and DPRK: Chronology of Key Events, 2020, International Atomic Energy Agency, Tersedia di : <https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/chronology-of-key-events>

Ingersoll, Geoffrey dan Taylor, Adam, 2013, *North Korea Allegedly Forces Diplomats to Sell Drugs for Hard Cash*, Business Insider, Tersedia di :

<https://www.businessinsider.com/north-korea-allegedly-turns-foreign-diplomats-into-big-time-drug-dealers-2013-3?IR=T>

Kleine-Ahlbrandt, Stephanie, 2013, *China's North Korea Policy*, 38 North, Tersedia di : <https://www.38north.org/2013/07/skahlbrandt070213>

Masterson, Julia, 2020, *Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy*, Arms Control Association, Tersedia di : <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron>

Moon, Chung-in, 2012, *The Sunshine Policy: In Defence of Engagement as a Path to Peace in Korea*, Foreign Affairs, tersedia di :

<https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/2012-10-31/sunshine-policy-defense-engagement-path-peace-korea>

Nichols, Michelle, 2019, *North Korea Took \$2 Billion in Cyberattack to Fund Weapon Programs: UN Report*, Reuters, Tersedia di : <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-cyber-un-idUSKCN1UV1ZX>

North Korea Claims Success in Fifth Nuclear Test, 2016, BBC News, Tersedia di : <https://www.bbc.com/news/world-asia-37314927>

North Korea Confirm 'Successful' Nuclear Test, 2013, The Telegraph, Tersedia di : <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/9864069/North-Korea-confirms-successful-nuclear-test.html>

North Korean Diplomats 'Sell Millions of Dollars Worth of Drugs', 2013, The Chosunilbo Media, Tersedia di : http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2013/03/20/2013032001084.html

Park, Ju-min, 2019, *How A Sanction-busting Smartphone Business Thrives in North Korea*, Reuters, Tersedia di : <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-smartphones-insight/how-a-sanctions-busting-smartphone-business-thrives-in-north-korea-idUSKBN1WB01Z>

Pham, Sherisse, 2017, *North Korea Still Making Millions From Small Arms Exports*, CNN Money, Tersedia di : <https://money.cnn.com/2017/09/14/news/north-korea-small-arms-trade/index.html>

Phillips, Toms, 2015, *100.000 Workers North Koreans Sent Abroad As 'Slaves'*, The Telegraph, Tersedia di : <https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/11424579/100000-North-Koreans-sent-abroad-as-slaves.html>

Snyder, Scott, 2015, *North Korea's Latest Export Labor*, Forbes, Tersedia di : <https://www.forbes.com/sites/scottasnyder/2015/05/22/north-koreas-latest-export-labor/#4935be20785d>

Un Sanctions Two Frims For North Korea Forced Labour, 2020, Aljazeera, Tersedia di : <https://www.aljazeera.com/economy/2020/11/19/us-sanctions-2-firms-for-exporting-forced-labour-from-north-korea>

Villas-Boas, Antonio, 2018, *North Korea Has Its Own Smartphones You Can't Buy Anywhere Else*, Business Insider, Tersedia di : <https://www.businessinsider.sg/north-korea-smartphones-2018-7?r=US&IR=T>

Wen, Philip, 2017, *Undaunted By Tensions, Chinese Tourist Flock Into North Korea*, Reuter, Tersedia di : <https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-tourism/undaunted-by-tensions-chinese-tourists-flock-into-north-korea-idUSKBN1AR09G>

Zang, Yong-an, 2010, *Drug Trafficking From North Korea: Implications for Chinese Policy*, Brookings, Tersedia di : <https://www.brookings.edu/articles/drug-trafficking-from-north-korea-implications-for-chinese-policy/>

Lain-lain :

Agreed Framework

Cuba: US Restriction on Travel and Remittances

Resolution 1695 (2006)

Resolution 1718 (2006)
Resolution 1874 (2009)
Resolution 2087 (2013)
Resolution 2094 (2013)
Resolution 2270 (2016)
Resolution 2321 (2016)